

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Pedata dan administrasi Terhadap Notaris Pejabat Publik: Cet. Ke-2.*(Bandung: Refika Aditama)
- Harahap, M.Yahya. *Segi-segi Hukum perjanjian.* (Bandung: Alumni,1986)
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* (Jakarta: Djambatan. 2003)
- Kansil, C.S.T. dan Christine ST Kansil. *Modul Hukum Perdata termasuk Asas-Asas Hukum Perdata.* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000)
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Cetakan ke-7. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian.* (Tangerang: Alumni, 1986)
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum.* (Jakarta: Rajawali, 1989)
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak – Hak Atas Tanah.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Subekti, R dan R.T. Tjitrosudibio. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994)
- Subekti, R. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1979)

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Undang – Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- \_\_\_\_\_. *Undang – Undang nomor 4 tahun 1996 mengenai Hak tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Tanah* Jo. *Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah* (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5893)
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
- \_\_\_\_\_. *Lampiran keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah*

### C. Jurnal

- Prawira, I Gusti Bagus Yoga. *Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal IUS Vol. IV Tahun 2016
- Tampubolon, Napoleon dan Gunawan Djajaputra. *Tanggung Jawab Camat sebagai PPAT Sementara dalam Hal Menandatangani Akta Jual-Beli (Contoh kasus Nomor Putusan 44/PDT.G/2014/PN KWG)*. Jurnal Hukum Adigama
- Triashari, N Wagty. *Kekuatan Hukum Persetujuan Suami atau Istri yang dibuat di Bawah Tangan*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol.3 No.3 Tahun 2018
- Yoan, Rizky, et al. *Tanggung Jawab Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara setelah tidak Menjabat lagi Terhadap Akta yang dibuatnya*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum kenotariatan Tahun 2017

### D. Kamus

- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1991)

### E. Artikel

- Gea, Sionit T. Martin,. *Camat selaku PPAT Sementara adalah Pejabat TUN*. <https://www.martingealawyers.com/2016/05/10/camat-selaku-ppat-sementara-adalah-pejabat-tun/>. diakses pada tanggal 09 April 2020